

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam usaha mengurai dan menjelaskan realisasi e-Warong, peneliti menggunakan kerangka konseptual, yakni menggunakan kuasa pengetahuan dari Michel Foucault untuk menjelaskan sistem kuasa dari satu kebijakan sosial (baca: e-Warong) secara historis, serta menggunakan konsep-konsep pemberdayaan dalam menganalisis pelaksanaan e-Warong. Adapun paparan kedua konsep tersebut sebagai berikut.

1. Konsep Pemberdayaan.

Umumnya orang beranggapan bahwa perubahan sosial (dalam hal ini pembangunan) adalah suatu hal yang netral dan memang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, infrastruktur, maupu yang lain. Kata “pembangunan” disejajarkan dengan “perubahan sosial”. Dalam pandangan lain mengatakan bahwa pembangunan adalah sebuah teori untuk melakukan perubahan sosial, yang pastinya juga membawa suatu ideologi-ideologi tertentu di dalamnya. Artinya, pembangunan tidak bisa dianggap sebagai suatu kata belaka yang bersifat netral tetapi merupakan suatu aliran sekaligus teori perubahan sosial.¹ Dalam pelaksanaan pembangunan ketika terjadi kegagalan, maka yang akan menjadi kambing hitam adalah kasus korupsi, kegagalan human dalam mengolah, dan lain sebagainya. Tidak pernah menyentuh dalam ranah sistem.²

¹Mansour Fakih, *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*, (Yogyakarta: INSISTPress), 2009, hal. 8-9.

²Murai lii, *The Will to Improve*, (Tangerang Selatan: Marjin kiri, 2018), hal 10

Satu kajian menyatakan kegagalan pembangunan karena pemerintah terlalu berfokus pada peningkatan ekonomi dan kekuatan pangan. Selain itu, dalam pelaksanaannya masyarakat yang sebagai sasaran dalam pembangunan hanya dijadikan sebagai objek penerima, tidak diajak untuk berpartisipasi. Sehingga setelah terlaksananya program tersebut justru memunculkan masalah-masalah baru, salah satunya berupa kesenjangan maupun ketergantungan. Dalam hal ini, nantinya digunakan untuk melihat rentetan kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan sebelum lahirnya kebijakan e-Warong.

Paradigma yang berkembang dalam pemberdayaan memiliki dua kubu besar. Pertama ialah asumsi yang sangat menonjol pada tahun 1970an melalui semangat *developmentalisme*, dalam pandangan ini pondasi yang dibangun dalam masyarakat adalah kesadaran naif atau perubahan sosial yang hanya reformatif, yang hanya melihat faktor manusia sebagai sumber dari masalah ketidakberdayaan. Kubu yang kedua ialah kubu yang menggunakan pendekatan "*bottom up*" sebagai pendekatan yang bertolak belakang dengan pendekatan "*top down*". Sehingga perlu adanya penyesuaian dari jalan tengah tentang kebijakan pemerintah yang mengambil jalan *bottom up* serta partisipasi masyarakat sebagai salah satu model pembangunan.³

Pemberdayaan masyarakat sejatinya ialah memberikan kekuatan kepada individu ataupun komunitas melalui pemberian kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam berbagai sektor. meskipun disebut masyarakat mandiri tidak lantas kemudian

³Yusuf Adam H, Model pembangunan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas, (jurnal Aristo, vol. 6, no. 1, 2018), hal. 52

terpisah dan lepas tangan atas peran negara. Akan tetapi masih diperlukannya peran negara dalam beberapa bidang, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Masyarakat yang mandiri berarti terbukanya ruang dan kapasitas dalam pengembangan potensi serta mengolah dan mengontrol sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, serta berpartisipasi dalam menentukan pembangunan. Umumnya, konsep pemberdayaan dilakukan melalui kelompok atau komunitas-komunitas, yang jika komunitas ini mampu melakukan aktifitas secara kolektif maka akan mengarah kepada kemandirian individu yang tidak lagi bergantung pada pihak yang tergolong eksternal.

Ledwith berpendapat bahwa ada empat dimensi dasar dalam pemberdayaan, yaitu:

- a) Pemberdayaan personal dengan pengetahuan, pembelajaran kepercayaan diri, dan skill.
- b) Aksi positif yang terkait akan kemiskinan, kesehatan, gender, diskriminasi, ras yang menentang struktur kekuasaan.
- c) Keefektifan satu komunitas dalam pengolahannya serta hubungan antar pihak luar.
- d) Partisipasi dalam pengolahan untuk perubahan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan pemberdayaan ada dua cara, yaitu secara konseptual dan empirik. Secara konseptual lebih kepada pendidikan kesadaran seperti halnya konsep Paulo Freire, pemberdayaan dijadikan sebagai sarana positif yang transformatif, bukan reformatif. Kemudian secara empirik, yaitu biasanya dilakukan dengan cara pembentukan dan pelaksanaan serta pendampingan dari

program-program (lebih kepada praktik) secara partisipatif. Kemudian tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan aktifitas pemberdayaan ialah:

- a) Pendekatan mikro, pada praktiknya bisa berupa bimbingan, konseling, serta intervensi krisis. Tujuan utama dalam pendekatan ini ialah kemampuan atas penyelesaian tugas-tugas dalam kehidupannya.
- b) Pendekatan mezzo, lebih berfokuskan pada kehidupan kelompok, secara praktiknya dapat berupa strategi-strategi peningkatan kemampuan kelompok, dinamika, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalahnya.
- c) Pendekatan makro atau sistem besar, sasaran dalam pendekatan ini berskala lebih besar lagi, secara praktik dapat berupa kebijakan, kampanye, dan lain-lain.⁴

Dari adanya konsep pemberdayaan ini nantinya digunakan peneliti sebagai alat untuk menganalisis proses, dimana kebijakan yang tergolong pemberdayaan ini sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan yang sudah ada atau memiliki konsep yang lain. Selain mengetahui proses, konsep ini juga mengantarkan peneliti untuk mengetahui struktur dan alur pemberdayaan, hal inilah yang nantinya juga dapat membantu untuk mengetahui relasi kuasa e-Warong.

2 . Kuasa Pengetahuan Michel Foucault

Michel Foucault merupakan seorang berkebangsaan Prancis, lahir pada tahun 1926. Dalam perjalanannya, ia dipengaruhi oleh aliran strukturalisme, namun ia juga banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Hal ini tampak dalam beberapa karyanya. Pada saat mengajar tentang filsafat Nietzsche, menurut dia ada kesamaan antara

⁴ Ibid. 54-56

genealogi dengan arkeologinya. Namun ada hal yang belum tersentuh Nietzsche, yakni tentang kuasa. Meskipun sebelum-sebelumnya Foucault juga sempat menyinggung tentang kekuasaan, kekuasaan inilah yang kemudian dijadikannya sebagai konsep atau fokus pada pemikirannya. Konsep kuasa yang dipaparkan Foucault berbeda dengan konsep kuasa pada umumnya yang mengidentikan kuasa dengan sebuah kerajaan maupun pemerintahan. Namun lebih dari itu, kuasa dijalankan dengan sebuah sistem yang rumit dan sistematis serta menempati posisi-posisi yang strategis satu sama lain.

Sebelum membicarakan kekuasaan, Foucault lebih dahulu membicarakan tentang pengetahuan. Fokus tentang pengetahuan ini bukan pengetahuan yang spesifik, lebih mudahnya ia lebih mengkaji tentang suatu bentuk pengetahuan yang mampu menjadi sebuah otoritatif dalam melegitimasi segala sesuatu. Struktur sosial yang otoritatif inilah yang nantinya mempengaruhi praktik-praktik sosial baik struktur hingga individu. Struktur pengetahuan inilah yang dinamai formasi wacana. Bagi Foucault, perkembangan pengetahuan dari masa ke masa bukanlah suatu hal yang berkembang secara evolutif, melainkan hanya suatu pergeseran bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Arkeologi digunakan untuk menangkap *episteme*, yaitu suatu masa pemantapan antara yang mungkin dilakukan dan tidak mungkin dilakukan atau datangnya disposisi pada suatu zaman, antara normalitas dan abnormalitas. Pemantapan ini terjadi sekaligus pada operasi kekuasaan. Dalam ruang *episteme* tidak lagi membicarakan antara yang benar maupun yang salah, akan tetapi pemisahan tersebut akan terjadi dalam ranah praktis, seorang akan mengetahui mana yang mungkin dilakukan dengan yang tidak mungkin ia lakukan. Foucault menggunakan arkeologi untuk mengetahui retakan

zaman berdasarkan *episteme*, yang ingin ia ketahui tentang bagaimana perubahan dari satu masa ke masa yang lain, dan hal ini tentu tak luput dari beroprasinya rezim kekuasaan.⁵ Konsep pengetahuan inilah yang nantinya digunakan peneliti untuk menguraikan tentang term kemiskinan.

Foucault juga menolak pandangan Marxis yang memaparkan bahwa kuasa bersifat subjektif yang berangkat dari adanya semangat menguasai kepada yang lain, ataupun merasa dikuasai oleh yang lain. Pandangan kuasa seperti yang dipaparkan diatas, yaitu tentang kuasa yang lebih meherujuk pada hal-hal tertentu misalnya negara, kerajaan, serta hukuman fisik bagi yang melanggar atau memberontak ialah pandangan kuasa secara tradisional.

Foucault menganggap bahwa kuasa justru bersifat positif serta produktif, mampu menciptakan realita dan ritus kebenaran yang mampu masuk melalui normalisasi maupun regulasi. Ia mencontohkan seperti halnya membangun penjara, yang dimana dalam penjara itu menggunakan kontrol yang hirarki, dengan menggunakan sistem semua orang saling mengawasi dan diawasi, artinya mereka akan terus merasa diawasi. Menurutnya, kuasa tidak datang dari luar, melainkan dari dalam seperti halnya melalui regulasi, aturan, sistem maupun yang lainnya. Semua itu saling berkaitan sehingga memunculkan kuasa, lebih jauh lagi ia menjelaskan hubungan antara kuasa dengan pengetahuan. Dimana dalam kuasa akan melahirkan pengetahuan, dan dalam pengetahuan pastilah memiliki nilai kuasa. Foucault mendiskripsikan kuasa bukan lagi kuasa bentuk fisik. Dalam masa modern, kuasa lebih bersifat halus bahkan tak tampak bahwa itu adalah kuasa,

⁵Umar Kamadi, *Teori kekuasaan Michel Foucault: tantang bagi sosiologi politik*, (Jurnal Al-Khitabah, Vol. 3, No. 1, 2017), hal. 119-121

justru kuasa dapat dijalankan melalui regulasi-regulasi yang nantinya dijalankan secara sukarela dalam suatu kelompok, organisasi, maupun negara.⁶

Memahami kekuasaan bukan lagi mengajukan pertanyaan siapa yang menguasai dan dikuasai, namun lebih bagaimana proses penguasaan itu terjadi. Kekuasaan bukanlah dinilai sebuah otoritas untuk mengontrol kelompok tertentu, melainkan kekuasaan ada di setiap relasi sosial, bukan lagi tentang legalitas dan penghukuman sosial melainkan lebih kepada normalisasi kelakuan dengan memanfaatkan produktifitas, dan ini terjadi disetiap momen. Hal ini sesuai untuk dijadikan pisau analisis tentang realisasi kebijakan e-Warong kekuasaan tidak hanya berbicara tentang siapa yang menguasai baik itu nagara, presiden, maupun pemerintah yang lain. Kekuasaan tidaklah dijalankan oleh mereka, melainkan adanya relasi dan proses yang terjadi dalam realisasi kebijakan e-Warong itu sendiri, sehingga menimbulkan relasi kuasa.

Lima proposisi yang dimaksudkan kekuasaan oleh Foucault ialah:

- a. Kekuasaan bukan suatu yang di dapat ataupun digenggam dan juga punah, namun kekuasaan ada disetiap relasi yang terus bergerak.
- b. Kekuasaan bukanlah hanya tampak dari struktur hirarkis tampak jelas siapa yang menguasai dan dikuasai.
- c. Kekuasaan tidak berada dalam ruang derajat atau distingsi *binary oposition*, melainkan dapat berangkat dari keduanya.
- d. Relasi kekuasaan bersifat niat dan keinginan atau intensional
- e. Satu orang berada dalam kekuasaan dan tidak dapat keluar dari kekuasaan.

⁶Joko Priyanto, *Wacana kuasa dan agama dalam kontestasi Pilgub Jakarta tinjauan relasi kuasa dan pengetahuan Foucault*, (jurnal *Thaqafiyat*, vol. 18, no. 2, tahun 2017), hal. 188-191

Kelima proposisi ini nantinya digunakan sebagai analisis apakah kekuasaan memang tidak bisa disamakan dengan hal yang dapat dimiliki, baik dimiliki KPM maupun pemerintah, meskipun pemerintah dalam struktur berada pada posisi lebih tinggi dari pada KPM dan KPM lah yang dijadikan sasaran dalam kebijakan. Selain itu dari adanya kuasa pengetahuan tentang kemiskinan melalui konsep formasi wacana, struktur, *episteme*, serta berujung pada praktik pemberdayaan inilah yang nantinya digunakan untuk membantu mendiskripsikan mengapa isu kemiskinan tidak kunjung selesai.